

DAFTAR BACAAN

BUKU

H.A.K Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar*, Pembangunan Jakarta, 1981.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2013.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bandung, 2001

Marihot Pahala Siahaan, *Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Muhammad Djaffar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan Jilid 2*, Eresco, Bandung, 1991.

Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009

Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang
Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852)

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010
Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14)

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 tahun 2015 tentang Pemeriksaan Nilai Objek Pajak
Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 42)

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Nilai Objek Pajak Pada Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2015 Nomor 55)

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2017 Nomor 21)

INTERNET

Herry Susanto, *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*,
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>, diakses pada 11 Juli 2020

Onlinepajak, *Sengketa Pajak Dan Cara Penyelesaiannya Di Indonesia* ,
<https://www.online-pajak.com/sengketa-pajak-dan-cara-penyelesaiannya-di-indonesia>, diakses pada 22 Agustus 2019.

Pengertian BPHTB, , <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/tarif-bphtb>,
diakses pada 17 Januari 2020

Ridho Syukro, *“Ini 3 Penyebab Sengketa Pajak”*,
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/170973/ini-3-penyebab-sengketa-pajak>,
diakses pada 22 Agustus 2019.

JURNAL

Erlina Diamastuti, "*Ke (tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assesment System*",
Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 20, Nomor 3, September 2016

Hardinal Cunda Dinata, "*Intensifikasi Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pringsewu*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018

Nabitatus Sa'adah, "*Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan*", Administrative Law & Governance Journal Vol. 1, Jurnal Fakultas Hukum. Agustus 2019,

Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Yogyakarta, Vol. 1 No. 1, Juni 2014.